



Asia Floor Wage Alliance

Aliansi Upah Dasar Asia Menuntut Akuntabilitas Merek Saat Tarif AS mengancam nasib jutaan pekerja Sektor Garmen

Juli 2025

Aliansi Upah Dasar Asia (AFWA), koalisi serikat pekerja yang mewakili ratusan ribu pekerja garmen di seluruh Asia, bersatu menentang kebijakan perdagangan yang mengancam kepentingan pekerja dan memperdalam ketidaksetaraan global. Penerapan tarif oleh pemerintah AS terhadap impor pakaian dari Asia mengancam mata pencaharian jutaan pekerja garmen, terutama perempuan yang sudah menerima upah di bawah garis kemiskinan.

Penerapan tarif berisiko memicu krisis kemanusiaan sama parahnya dengan pandemi COVID-19 – ketika merek global mengabaikan tanggung jawab mereka – memicu pemutusan hubungan kerja massal, penutupan pabrik, pencurian upah secara luas, dan peningkatan kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Biaya manuver geopolitik akan ditanggung oleh pekerja garmen – mayoritas di antaranya adalah perempuan – yang akan menghadapi pengangguran dan kemiskinan yang semakin parah. Sementara pemilik merek terus mengutamakan keuntungan di atas kepentingan buruh.

“Tarif tidak boleh digunakan sebagai senjata dalam konflik geopolitik. Kami menolak penerapan tarif yang tidak adil dan berdampak melanggar kemanusiaan,” kata Wiranta Ginting, Wakil Koordinator Internasional AFWA. “Merek-merek yang mendapat keuntungan dari produksi outsourcing tidak boleh diam atau pasif ketika perubahan tarif memicu penutupan pabrik atau pemutusan hubungan kerja massal.”

Untuk menciptakan sektor garmen global yang adil dan setara, kami mengusulkan empat prinsip pokok yang harus menjadi dasar untuk merestrukturisasi perdagangan global di industri garmen:

1. Menolak Penggunaan Tarif sebagai Senjata

Tarif adalah cara yang lazim untuk meningkatkan pendapatan negara dan kapasitas fiskal. Namun, dalam konteks ekonomi produksi global, tarif dapat memiliki dua tujuan lain yang berbeda:

- i. Untuk restrukturisasi distribusi produksi demi keadilan dan kesempatan kerja bagi pekerja.
- ii. Untuk menerapkan tindakan hukuman geopolitik terhadap ekonomi tertentu.

Dalam kasus pertama, jika tarif memang dapat memindahkan produksi garment ke AS dan memberikan kesempatan kerja bagi pekerja di sana, maka argumentasi yang disampaikan mestinya adalah pemindahan tersebut demi kepentingan pekerja. Namun, saat ini belum ada skenario yang memungkinkan pengalihan produksi garmen ke AS. Biaya produksi akan menjadi



Asia Floor Wage Alliance

sangat tinggi, akibatnya harga eceran produk garmen makin mahal dan sulit dijangkau konsumen di AS dan negara lain di dunia. Tarif di sektor pakaian di AS tidak dapat mengarah pada pemulihan signifikan produksi pakaian kembali ke AS. Tarif semacam itu hanya memiliki satu tujuan – tindakan hukuman untuk tujuan geopolitik yang tidak transparan.

AFWA menolak tarif yang bersifat menghukum. Tarif tidak boleh dijadikan senjata untuk menangani konflik geopolitik.

2. Penyesuaian Tarif Harus Proporsional dan Adil

Jika tarif memang harus diterapkan, maka tarif tersebut harus proporsional dan adil. AFWA menolak kebijakan tarif apa pun yang mendistorsi distribusi perdagangan yang ada dengan cara yang menguntungkan beberapa negara dibandingkan negara lainnya di kawasan ini. Struktur tarif yang tidak proporsional berisiko mengacaukan basis produksi di Asia. Faktanya, jaringan produksi global telah memberikan kesempatan untuk memperluas basis industri di negara-negara berkembang, meskipun sebagian besar berada pada tingkatan terendah dalam rantai produksi, dengan kepatuhan terhadap hak-hak buruh yang rendah, sehingga menyebabkan pekerjaan dengan upah rendah.

Tarif yang diusulkan akan mendistorsi jaringan produksi global sebagai mesin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Struktur tarif harus proporsional terhadap harga dasar barang, memastikan bahwa pangsa pasar AS saat ini yang dimiliki negara-negara produsen tetap terjaga atau tidak terganggu secara drastis. Kebijakan tarif tidak boleh digunakan untuk memecah belah kelas pekerja garmen di Asia atau memprovokasi persaingan destruktif di antara mereka. Pekerja harus bersatu atas dasar nilai kolektif dari kerja di kawasan ini dan menjaga stabilitas perdagangan.

3. Arahkan Pendapatan Tarif untuk Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Pekerja garmen termasuk kelompok dengan upah terendah di sektor manufaktur, dan Asia memproduksi sebagian besar pakaian untuk pasar global. Asia juga menjadi tempat bagi populasi pekerja miskin terbesar. Dengan upah setara garis kemiskinan, pekerja garmen perempuan berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tarif yang diterapkan oleh pemerintah AS akan meningkatkan pendapatan negara mereka. Namun tarif ini juga merupakan bentuk pajak terhadap jaringan produksi global dan harus diakui demikian. Demi keadilan, AFWA menuntut pembagian pendapatan tarif yang adil, yang diperoleh pemerintah AS dari rantai pasok global garmen. Setidaknya **50% dari pendapatan tarif harus dibagikan kepada negara produsen dalam bentuk Dana Jaminan Sosial untuk pekerja garmen**. Dana ini akan membantu meminimalkan dampak menghancurkan dari tarif yang bersifat menghukum. Dana ini seharusnya memberikan dukungan penting di saat terjadi



Asia Floor Wage Alliance

PHK, penutupan pabrik, atau pengalihan produksi yang disebabkan oleh gangguan akibat tarif.

Lebih lanjut, rezim perdagangan harus menginstitusikan hal ini dalam perjanjian bilateral, dan pemerintah seharusnya ikut berperan dalam menciptakan dana jaminan sosial ini.

4. Tuntut Akuntabilitas Merek dalam Kompensasi Pekerja

Ketika merek menarik diri (meninggalkan) pabrik pemasok—dampaknya langsung dan menghancurkan bagi pekerja. Seluruh buruh di-PHK tanpa peringatan atau penghasilan pengganti. Pengunduran diri (keluarnya merek) ini merupakan bagian dari pola yang terus terjadi dalam rantai pasok global—di mana merek melindungi diri dari risiko, sementara dampak kerugian.

Kita telah melihat kenyataan ini secara gamblang selama krisis COVID-19: merek membatalkan pesanan secara tiba-tiba dan meninggalkan pabrik-pabrik pemasok di seluruh negara produsen garmen. Jutaan pekerja—kebanyakan perempuan—ditinggalkan tanpa upah, pesangon, atau bentuk dukungan apa pun. Kini, keluarnya merek akibat tarif mengancam akan menimbulkan gelombang kehancuran serupa—kecuali ada langkah-langkah perlindungan segera yang diterapkan.

Tidak ada satu pun merek yang boleh keluar dari pabrik tanpa bernegosiasi dengan Asia Brand Bargaining Group (ABBG)—badan perundingan regional AFWA. Dua skenario dapat terjadi:

- i. Ketika sebuah merek menarik diri dan menyebabkan **penutupan pabrik secara total**, maka pekerja harus diberi **kompensasi penuh atas tahun-tahun pengabdian** mereka dan tidak dibiarkan ketika menjadi pengangguran mendadak. Kompensasi ini harus tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan standar nasional dan internasional, serta dibayarkan oleh merek secara proporsional terhadap skala bisnis mereka dengan negara dan perusahaan pemasok.
- ii. Dalam kasus **penutupan pabrik secara sebagian**—yang mengakibatkan PHK, pengurangan jam kerja, atau pemotongan upah—pekerja tetap harus dilindungi. Pekerja yang mengalami PHK sementara karena penurunan pesanan harus menerima kompensasi **sebesar minimal 75% dari upah reguler mereka** selama masa PHK. Jika PHK sementara itu berubah menjadi permanen, maka kompensasi penutupan penuh juga harus dibayarkan.

Dalam semua skenario, **pekerja yang diberhentikan harus diprioritaskan untuk dipekerjakan kembali dan merupakan syarat yang tidak bisa dinegosiasikan.** Merek harus bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan bahwa setiap masalah akibat keputusan yang diambil terkait dengan tarif tidak digunakan sebagai alat untuk melemahkan



Asia Floor Wage Alliance

serikat pekerja atau hak-hak buruh. Pekerja garmen tidak boleh diperlakukan sebagai sebuah barang dapat dibuang begitu saja.

Buruh harus memiliki perspektif perdagangan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang seimbang, adil, dan berkelanjutan, serta membangun satu front untuk melawan segala bentuk ketidakadilan perdagangan. Dua hal yang harus menjadi prinsip dari perspektif tersebut:

- i. Pembangunan industri yang seimbang diantara semua Negara;
- ii. Distribusi pendapatan yang adil dan berkelanjutan dari pajak atas jaringan produksi global.

Kami menolak pembangunan struktur perdagangan global yang dibangun atas dasar eksploitasi—yang memberikan keuntungan miliaran kepada merek-merek, namun mendorong pekerja—terutama perempuan—ke dalam kemiskinan dan utang. Sudah saatnya menulis ulang aturan perdagangan global: yang menempatkan pekerja, bukan hanya akumulasi kekayaan segelintir orang, di pusatnya. Industri garmen global harus berakar pada **keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas**.

Merek tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan dari buruh berupah rendah lalu menghilang saat krisis melanda. Pemerintah tidak boleh menjadikan perdagangan sebagai senjata yang mengorbankan kehidupan manusia. Kami menyerukan kepada gerakan buruh global untuk bangkit bersama gerakan buruh Asia—karena ketika satu bagian dari kelas pekerja diserang, seluruh kelas berada dalam bahaya. Melalui kewajiban merek yang mengikat, redistribusi pendapatan perdagangan kepada pekerja, dan perlawanan kolektif terhadap pola perdagangan yang eksploitatif, kita akan melawan balik. **Segala hal selain itu adalah pengkhianatan. Segala hal selain itu adalah kolusi.**